
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

penataan organisasi, penyempurnaan bisnis proses, pengembangan sumber daya manusia, indikator kinerja utama, manajemen resiko
tata cara perencanaan, penelahaan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan bendahara umum negara

Buku Profil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

Budget in brief APBN 1995/96

Dasar-dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.02/2019 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020

Anggaran pendapatan dan belanja negara & pedoman pelaksanaan APBN.

A Manual on Government Finance Statistics

Kum[ulan Soal - soal yang Sering & Selalu Keluar Setiap Tahunnya

Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Cerita Tiga Menteri Menghadapi Krisis

Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.02/2016 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran

Pencairan Dana Pemerintah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Hasil-hasil rapat dinas ke 4 Direktorat Jenderal Anggaran, Cibulan tg. 25 s/d 27 April 1973

Laporan hasil kajian bidang hukum ekonomi pembangunan

Profil reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Anggaran 2009

dari ORI sampai reformasi

Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2017 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2017

PMK Nomor 49/PMK.02/2017

Tatacara pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri untuk pembiayaan pembangunan

Himpunan surat-surat keputusan dan peraturan-peraturan tentang pelaksanaan proyek

Buku Profil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

PMK Nomor 78/PMK.02/2019

Panduan Lengkap USM STAN 2015

Himpunan surat-edaran triwulan ke 1, 1976/1977 (April s/d Juni 1976).

45 tahun uang Republik Indonesia 1946-1991
petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran
Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.02/2015
Senarai inovasi tahun 2017
Departemen Keuangan
Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045
Menelisi Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri
Kompilasi peraturan klasifikasi anggaran
Bunga Rampai Keuangan Negara : Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia Edisi 2020
SBM Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020
Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political
Sciences, BSPACE, 26-28 November, 2019, Malang, East Java, Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.02/2015
Direktorat Jenderal Anggaran dari masa ke masa, 1966-1999
Penggunaan Kode Lokasi BPS pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

*Direktorat
Jenderal
Anggaran
Kementerian
Keuangan RI*

*Downloaded
from
<ftp.wtvg.com> by
guest*

MILES ALISSON

penataan organisasi,

*penyempurnaan bisnis
proses, pengembangan
sumber daya manusia,*

indikator kinerja utama, manajemen resiko
 Direktorat Sistem
 Perbendaharaan,
 Direktorat Jenderal
 Perbendaharaan,
 Kementerian Keuangan
 STAN adalah kampus
 yang akan menghasilkan
 pegawai-pegawai yang
 akan di tempatkan di
 Instansi-instansi krusial.
 Untuk menghasilkan
 pegawai yang
 berintegritas, STAN selalu
 menerapkan disiplin yang
 tinggi, terutama
 kejujuran. Agar anda
 mampu bersaing dan lulus
 Ujian Saringan Masuk

STAN, anda harus terbiasa
 menyelesaikan soal-soal
 yang akan diujikan di
 dalam USM STAN. Buku
 yang diterbitkan oleh
 penerbit LEMBAR
 PUSTAKA INDONESIA ini
 berisi jenis-jenis soal yang
 biasanya diujikan dalam
 USM STAN. Seperti Tes
 Kemampuan Umum, Tes
 Bahasa Indonesia -
 Inggris, Tes Potensi
 Akademik . Jika anda
 mampu menyelesaikan
 soal-soal yang ada di
 dalam buku ini, maka
 kemungkinan besar anda
 bisa lulus dalam Ujian
 Saringan Masuk STAN. -

Lembar Langit Indonesia
 Group-
tata cara perencanaan,
penelaahan, dan
penetapan alokasi
anggaran bagian
anggaran bendahara
umum negara, dan
pengesahan daftar isian
pelaksanaan bendahara
umum negara Direktorat
 Sistem Perbendaharaan,
 Direktorat Jenderal
 Perbendaharaan,
 Kementerian Keuangan
 Sistem pembayaran, yang
 merupakan suatu sistem
 dari rangkaian panjang
 pengeluaran negara,
 adalah sistem yang

dimiliki Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengeluarkan uang dari rekening pengeluaran untuk keperluan pembayaran kepada yang berhak. Saat ini sistem pembayaran dilakukan dengan metode tunggal yakni melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berfungsi sebagai bilyet giro yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebit sejumlah dana pada rekening milik BUN dan memindahkannya ke rekening pihak ketiga. Dari rangkaian berbagai

aktivitas pada sistem pembayaran, settlement SP2D merupakan akhir dari seluruh rangkaian pada sistem pembayaran. Tepat jumlah, tepat orang dan tepat waktu merupakan tiga elemen dasar yang harus dimiliki oleh sebuah sistem pembayaran. Proses penerbitan dan settlement SP2D sendiri telah mengalami banyak penyempurnaan, seperti percepatan penerbitan SP2D dan penyampaian soft copy SP2D kepada Bank Operasional. Meskipun demikian, masih

terdapat beberapa potensi kelemahan yang perlu dicari solusinya. Dua kelemahan yang paling dirasakan adalah tidak dapat dipastikannya kapan aliran dana pencairan SP2D dapat diterima yang berhak serta kemungkinan terjadinya retur transaksi SP2D. Meski penyebab retur telah dapat diidentifikasi, namun sejauh ini belum terdapat upaya yang komprehensif dan tuntas untuk pencegahannya. Selain dua kelemahan tersebut, aktivitas settlement SP2D

saat ini masih didominasi dengan proses manual dan terlalu banyak membutuhkan intervensi manusia. Penulisan buku ini ditujukan untuk menghasilkan solusi yang sistematis dan upaya pencegahan atas berbagai permasalahan yang timbul.

Penyempurnaan settlement SP2D didasarkan atas penyempurnaan proses bisnis seluruh aktivitas yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berlaku umum di dunia

perbankan. Untuk mencegah terjadinya retur – sebuah proses yang sangat memakan waktu dan biaya – diusulkan untuk menerapkan metode validasi atas data dan status rekening tujuan pembayaran dengan menggunakan koneksitas dengan penyedia jaringan data perbankan. Untuk tujuan yang sama, perlu dilakukan penyempurnaan atas aplikasi satker berupa database rekening yang menyimpan data rekening pihak ketiga sehingga

mengurangi aktivitas entry dan re-entry nomor rekening pada aplikasi satker termasuk pembangunan model aliran dan keamanan informasi data rekening dari satker kepada KPPN hingga diteruskan kepada pihak perbankan. Sejalan dengan penyempurnaan proses bisnis di atas, turut diusulkan untuk membangun relasi langsung antara rekening pengeluaran yang didebit dengan rekening penerima dana, dengan cara membebaskan Rekening Pengeluaran

Kuasa BUN Pusat pada bank yang sama dengan bank pada rekening tujuan. Selain untuk mengurangi jumlah jaringan perbankan yang terlibat, juga untuk penyederhanaan jumlah rekening yang dikelola BUN dan sebagai sentralisasi settlement kas melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Implementasi berbagai usulan pada buku ini dibagi ke dalam dua periode, yakni sebelum Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan pada saat

SPAN dijalankan. Periodesasi implementasi perlu dilakukan karena terdapat dua sistem yang berbeda pada dua kurun waktu yang berbeda pula. Selain untuk mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas baru, periodesasi tersebut juga untuk memberikan jaminan bahwa seluruh usulan penyempurnaan dapat diimplementasikan dengan baik.

**Buku Profil Kanwil
Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Gorontalo**
Direktorat Sistem

Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Collection of Indonesian Minister of Finance regulations on preparation of work plan and budget for ministry and government institutes in Indonesia.

Budget in brief APBN 1995/96 Tempo Publishing
Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan

sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan penyusunan landasan hukum pengelolaan keuangan negara. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran negara. Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu didukung oleh sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara (presiden) baik kepada chief financial officer (CFO) sebagai

Bendahara Umum Negara maupun chief operating officer (COO) sebagai pengguna anggaran. Sebagai tindak lanjut penerapan sistem manajemen penganggaran maka diluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai wadah dalam menerapkan sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan negara. Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan dukungan sistem informasi yang

handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan sejak tahun 2004 Departemen Keuangan telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran. Rencana tersebut dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia

dalam payung Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) di Departemen Keuangan. Salah satu unsur utama dalam GFMRAP tersebut adalah proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan

anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima kementerian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran

harus memenuhi sasaran dari Public Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada: fokus pada kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiskal. Dasar-dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia European Alliance for Innovation Pemerintah akan menaikkan gaji pokok

pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, serta pensiunan sebesar 7 persen pada 2013. Kenaikan juga direncanakan untuk gaji hakim, tapi besarnya belum ditetapkan. Ada pula alokasi anggaran untuk gaji ke-13. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.02/2019 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020** Binsar Hiras Publisher Postur APBN Indonesia *Anggaran pendapatan dan belanja negara &*

pedoman pelaksanaan APBN. Lembar Langit Indonesia Dalam pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) kebutuhan akan data dan informasi yang mudah dipertukarkan menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan SPAN merupakan upaya penyederhanaan Sistem Informasi Manajemen yang selama ini dikembangkan secara terpisah oleh masing-masing Direktorat Jenderal yang terlibat dalam SPAN. Selain itu,

SPAN juga akan berinteraksi dengan Sistem Informasi lain baik sebagai penyedia data maupun sebagai pengguna data, sehingga kebutuhan untuk pertukaran data yang mudah dan aman menjadi sangat penting. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government serta sejalan dengan upaya standarisasi format data dan informasi yang saling dipertukarkan antara instansi pemerintah

melalui IGASIS, maka penggunaan kode-kode yang hanya dimengerti oleh satu instansi sedapat mungkin dihindari. Hal ini dikarenakan, penggunaan kode-kode yang berbeda antar sistem aplikasi akan menyebabkan permasalahan keakuratan data yang dihasilkan (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:2008). Salah satu kode yang sering ada dalam sistem informasi di lingkungan pemerintah adalah kode lokasi. Kode lokasi sering kali merujuk pada pembagian wilayah

secara administratif yakni mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan Kelurahan/Desa. Untuk beberapa sistem informasi, kode lokasi juga menunjukkan lokasi yang berada di luar negeri misalnya kode lokasi dalam Aplikasi DIPA. Kode Lokasi saat ini secara formal belum masuk dalam salah satu komponen Bagan Akun Standar (BAS) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, akan tetapi secara faktual, kode lokasi ini di pakai oleh beberapa

aplikasi yang dikembangkan Ditjen Perbendaharaan dalam rangka Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN. Dalam Rancangan Bagan Akun Standar yang akan digunakan dalam SPAN, kode lokasi merupakan salah satu elemen yang harus ada dalam kombinasi akun (chart of account, atau disingkat CoA) dalam setiap transaksi dalam SPAN nantinya. Dengan demikian, nantinya kode lokasi harus dinyatakan secara formal menjadi bagian dari Bagan Akun

Standar yang digunakan oleh SPAN. Untuk memudahkan pertukaran data yang melibatkan kode lokasi antara SPAN dan sistem informasi selain SPAN ada baiknya digunakan kode lokasi yang lebih banyak digunakan dan telah diakui oleh pihak lain. Hal ini karena, kode lokasi yang digunakan dalam aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan memiliki perbedaan dengan pengkodean yang sudah banyak digunakan oleh sistem informasi di luar

Ditjen Perbendaharaan. Kode Lokasi yang dimaksud adalah kode lokasi yang dikembangkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Alasan penggunaan kode lokasi BPS sebagai salah satu segmen BAS adalah kode ini sudah banyak dipakai oleh Sistem informasi lain yang ada di lingkungan Pemerintah Pusat RI, termasuk menjadi salah satu bagian dari Nomor Objek Pajak (NOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
A Manual on Government

<p><i>Finance Statistics</i> Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Regulation of the Indonesian Minister of Finance on guidelines for formulation and review of work plans and budgets of state ministries/agencies and ratification of list of budget implementation. <u>Kumpulan Soal - soal yang</u> <u>Sering & Selalu Keluar</u> <u>Setiap Tahunnya</u> Postur APBN Indonesia On budget allocation in the state budget of</p>	<p>Indonesia.Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.02/2017 tentang petunjuk penyusunan dan penalaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaranDirektorat Jenderal Anggaran dari masa ke masa, 1966-1999Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.02/2019 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020Peraturan Menteri Keuangan nomor</p>	<p>163/PMK.02/2016 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaranRegulation of the Indonesian Minister of Finance on guidelines for formulation and review of work plans and budgets of state ministries/agencies and ratification of list of budget implementation.PMK Nomor 78/PMK.02/2019SBM Standar Biaya Masukan</p>
---	--	---

<p>tahun anggaran 2020 Anggaran pendapatan dan belanja negara & pedoman pelaksanaan APBN. Laporan hasil kajian bidang hukum ekonomi pembangunan Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2017 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2017 Budget in brief APBN 1995/96 Hasil-hasil rapat dinas ke 4 Direktorat Jenderal Anggaran, Cibulan tg. 25 s/d 27 April 1973 Profil reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Anggaran</p>	<p>2009 penataan organisasi, penyempurnaan bisnis proses, pengembangan sumber daya manusia, indikator kinerja utama, manajemen resiko Penggunaan Kode Lokasi BPS pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Practical guidance on the state budget of Indonesia drafting. Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Cerita Tiga Menteri Menghadapi Krisis</p>	<p><u>Manajemen Keuangan</u> <u>Anggaran Transfer ke</u> <u>Daerah pada Sistem</u> <u>Perbendaharaan dan</u> <u>Anggaran Negara</u> Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan This Manual deals with concepts, definitions, and procedures for the compilation of statistics on government finance. It is intended as a reference tool for those who are called upon to prepare or evaluate such statistics. Focusing on financial</p>
--	--	---

transactions such as taxing, borrowing, spending, and lending, the Manual emphasizes the summarization and organization of statistics appropriate for analysis, planning, and policy determination.

Cerita Tiga Menteri Menghadapi Krisis PKN
STAN Press
Buku Bunga Rampai Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran untuk Indonesia ini mengupas 4 tema besar keuangan negara, yaitu keuangan publik, perpajakan, akuntansi

pemerintah, dan kepabeanan dan cukai. Buku ini hasil pemikiran dan kontribusi konstruktif para dosen di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN dan dosen di berbagai penjuruan nusantara berdasarkan pengalaman mereka selama bertahun-tahun di ranah keuangan negara. Buku ini bermanfaat sebagai referensi untuk berbagai kalangan, baik pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami dinamika pengelolaan keuangan negara dan alternatif

penanganannya. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan buku ini bisa menjadi secercah kontribusi menuju penanganan keuangan negara yang lebih baik.
Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.02/2016 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran
Direktorat Sistem Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Penggunaan transaksi keuangan secara elektronik saat ini tidak hanya banyak dilaksanakan pada sektor swasta, namun juga mulai berkembang pada sektor pemerintahan. Bila mengacu pada APBN 2011 yang sudah di atas Rp.1.000 triliun, maka sejumlah itu pula nominal transaksi keuangan negara yang akan terjadi selama periode satu tahun anggaran. Melihat besarnya nominal transaksi keuangan

negara yang dilaksanakan selama periode tahun anggaran tersebut, aspek keamanan dalam pelaksanaan pencairan dana pemerintah perlu mendapat perhatian yang optimal. Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada segenap jajaran pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penyaluran dana APBN tentang pentingnya peningkatan keamanan dalam transaksi keuangan negara. Dalam rangka menuju penerapan

transaksi keuangan negara secara elektronik. penggunaan tanda tangan elektronik sangat diperlukan untuk meningkatkan authenticity dan security dari dokumen perintah membayar yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga/satuan Kerja. Mengingat bahwa implementasi transaksi keuangan negara secara elektronik (termasuk penerapan tanda tangan elektronik) ini merupakan suatu proses bisnis baru di lingkungan pemerintahan dan akan

mengubah mind set dan kebiasaan para pihak yang terlibat di dalamnya, maka dibutuhkan dukungan secara penuh dari unsur pimpinan, termasuk dari stakeholder terkait.

Pencairan Dana

Pemerintah pada Sistem

Perbendaharaan dan

Anggaran Negara

FORMAPPI

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2004, dengan diberlakukannya satu paket perundang-undangan bidang

keuangan negara. Dari adanya undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia berharap dapat menjadi Indonesia yang maju pada tahun 2045 mendatang yang memiliki pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, buku ini berusaha mendokumentasikan bagaimana harapan-harapan generasi muda untuk turut serta dalam menyongsong perubahan

APBN untuk Indonesia maju pada 2045. Buku ini yang memuat asa dan cita-cita bagi masyarakat Indonesia beserta segala hal di dalamnya, diharapkan dapat tersebarluaskan sehingga para pembaca juga turut memiliki optimisme dan harapan yang besar untuk negara Indonesia.

Hasil-hasil rapat dinas ke 4 Direktorat Jenderal Anggaran, Cibulan tg. 25 s/d 27 April 1973 Tempo Publishing

Momentum reformasi keuangan negara ditandai

dengan lahirnya paket Undang-undang Keuangan Negara. Salah satu yang diatur dalam paket undang-undang ini adalah mengenai pembagian peran yang jelas antara Kementerian/Lembaga sebagai Satuan Kerja (Satker) dan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Satker disebut sebagai Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang teknis tertentu pemerintahan, sementara Menteri Keuangan disebut sebagai Chief Financial

Officer (CFO) Pemerintah RI. Sebagai COO, Satker diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan dengan sebelumnya, khususnya dalam hal kewenangan administratif. Kewenangan administratif tersebut meliputi kegiatan pembuatan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, kegiatan pengujian dan pembebanan tagihan

yang diajukan kepada Satker sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta pemberian perintah pembayaran atau penagihan penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan sebagai CFO berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas dan regulator pengelolaan keuangan negara, serta sebagai fund manager pemerintah. Sejalan dengan pembagian tugas antara CFO dan COO, maka konsep "let the

manager manage” diselenggarakan, dimana konsep ini memberikan keleluasaan dalam batas-batas peraturan perundangan kepada Satker dalam pengelolaan keuangannya. Satker dalam pengelolaan keuangannya mempunyai kedudukan yang unik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengelolaan perbendaharaan negara di Departemen Keuangan (Ditjen Perbendaharaan). Satker dapat dilihat sekaligus sebagai stakeholder, customer,

client, user, owner dan/atau counterpart dari Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara di Satker harus berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan negara di Ditjen Perbendaharaan. Pengelolaan keuangan negara di Satker merupakan salah satu input bagi Ditjen Perbendaharaan dalam fungsinya sebagai Kuasa BUN baik itu dalam hal akuntabilitas maupun

dalam hal fund management. Implikasinya, kemampuan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Satker sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi treasury di Ditjen Perbendaharaan. *Laporan hasil kajian bidang hukum ekonomi pembangunan* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat. Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan, disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang diharapkan.

Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis

Oracle Finance. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian. *Profil reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Anggaran 2009* On budget allocation in the state budget of Indonesia.

dari ORI sampai reformasi

We are delighted to introduce the 2019 Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences (B-SPACE). The aim of B-SPACE (Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences) is to provide a platform for various stakeholders, varying from professionals, researchers, and academicians from across the world to present their scientific take and research results on social

and political matters. The theme of B-SPACE 2019 was “Gender & Digital Society 4.0”. The amount of participants registered on the initial phase was 140. However, BSPACE 2019 cumulatively consisted of 79 scientific papers, presented orally by the respective authors during the two-day-conference. The oral presentation sessions were opened for the public, allowing a productive interaction between the presenters and the audience where knowledge and

information were further shared. Aside from the opportunity to present them in front of an audience, the submitted scientific papers are processed to be published in EAI/EUDL proceedings.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2017 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2017

Pembangunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) – yang akan menjadi sistem manajemen keuangan dalam

pengelolaan APBN di tahun 2012 – akan membawa implikasi pada perubahan proses bisnis pengelolaan anggaran. Meski desain utama pembangunan SPAN berada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), perubahan yang diusung akan berpengaruh pada proses bisnis di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah. Hal tersebut adalah suatu yang wajar

mengingat bahwa nantinya seluruh mekanisme penganggaran dan penyaluran APBN akan melalui sistem dan prosedur yang terdapat pada SPAN. Di dalam kajian ini, poin-poin penting terkait perubahan proses bisnis pengelolaan Transfer ke Daerah adalah (i) pemberian akses langsung ke dalam SPAN secara real time dan online bagi pejabat/petugas pengelola anggaran Transfer ke Daerah pada DJPK, (ii) penggunaan

kode satker dengan kode lokasi provinsi/kabupaten/kota penerima dana sehingga halaman II DIPA sudah terperinci per provinsi/kabupaten/kota, (iii) kode lokasi sebagaimana disebut pada butir (ii) adalah mengacu pada kode daerah yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, (iv) reklasifikasi akun untuk tiap jenis anggaran Transfer ke Daerah dari satu akun menjadi beberapa akun dan (v) penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas

realisasi penerimaan. Kajian ini dibatasi pada cakupan pengelolaan transfer ke daerah yang saat ini menjadi tugas DJPK. Namun demikian, sebagai bagian dari Bagian Anggaran 999, anggaran Transfer ke Daerah mengambil porsi yang signifikan terhadap anggaran belanja negara. Dengan demikian, integrasi proses bisnis dan informasi pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah ke dalam SPAN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

negara dan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Keberhasilan pembangunan interkoneksi proses bisnis antara DJPK selaku satker dan SPAN, ke depannya, akan menjadi cikal bakal integrasi pengelolaan keuangan negara secara nasional.

PMK Nomor

49/PMK.02/2017

DPR 2014-2019 sepanjang tahun pertamanya bekerja menampilkan sejumlah denomena baru dalam praksis politik demokrasi sepanjang

masa reformasi. Ini merupakan DPR yang terbelah dalam dua koalisi politik besar sejak awal pembentukannya karena pengaruh langsung dari kompetisi ketat Pilpres 2014. Untuk pertama kalinya juga, satu Parpol yaitu: Partai Demokrat, menyatakan secara tegas untuk tidak berkubu dalam koalisi politik KIH atau KMP. DPR baru ini juga diawali dengan kecenderungan kuat untuk memaksakan pengkubuan dalam mayoritas-minoritas Koalisi politik untuk

membentuk komposisi penguasaan kursi DPR secara permanen untuk menentukan pembuatan keputusan di DPR. Pemenuhan tuntutan (intersepsi) KIH untuk

mendapatkan bagian kursi kepemimpinan DPR nampak merupakan cara taktis melepas "boikot politis" KIH dengan tanpa mengurangi sedikitpun penguasaan kursi DPR

oleh KMP. Pengkubuan politik dalam KMP dan KIH berlangsung secara relatif stabil sepanjang satu tahun masa kerja DPR. Buku persembahan penerbit Formappi